

ABSTRAK

**“KONTRA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERALIHAN HAK MILIK
ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 84/BANGSAL KOTA
KEDIRI DALAM PERKAWINAN CAMPURAN”
(Studi Kasus : PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 188
PK/PDT/1981 TANGGAL 22 DESEMBER 1982)**

Hak Milik atas tanah hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia dan Badan-Badan Hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Warga Negara Asing tidak dapat mempunyai hak milik sesuai asas kenasionalan. Pengaturan perkawinan campuran sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur dalam Staatsblad 1898 No.158 yang mengatur perkawinan antara golongan penduduk yang tunduk terhadap hukum yang berbeda. Perkawinan campuran antara golongan penduduk Tionghoa dengan Pribumi tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Staatsblad 1898 No.158 dan KUHPerduta. Akibat perkawinan campuran terhadap harta kekayaan perkawinan adalah persatuan bulat atas harta kekayaan perkawinan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis mengambil studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 188 PK/PDT/1981 tanggal 22 Desember 1982 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1387/K/SIP/1977 tanggal 18 Januari 1979 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 135/1977 Pdt. tanggal 23 Mei 1977 jo. Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 55/1976 Pdt. tanggal 24 Agustus 1976. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder. Metode analisa data adalah analisa kualitatif.

Jual beli pada tahun 1975 terhadap hak milik atas tanah milik warga pribumi yang dilakukan oleh golongan penduduk Tionghoa yang berkewarganegaraan asing dalam perkawinan campuran dengan warga pribumi (Warga Negara Indonesia) yang tidak tercatat di Kantor Catatan Sipil berakibat hukum tidak terjadi persatuan bulat atas harta kekayaan perkawinan, sehingga jual beli tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Kata kunci : Perkawinan campuran, persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, peralihan hak milik atas tanah, dan jual beli

ABSTRACT

"CONTRA JUDGE'S DECISION OF THE TRANSFER OF RIGHTS ON LANDS OF LAND CERTIFICATE NUMBER 84 / BANGSAL KEDIRI IN MIXED MARRIAGE"

(Case Study: SUPREME COURT DECISION NUMBER 188 PK / PDT / 1981 DATED DECEMBER 22, 1982)

Rights on lands can only be granted to Indonesian citizens and National Institution that have been established by the Government pursuant to Act No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agraria. Foreign citizens can not have rights on lands in accordance principle of nationality. The setting of intermarriage before Act No. 1 of 1974 on Marriage, set in 1898 158 Statute governing marriage between population groups are subject to different laws. Intermarriage between Chinese class with the Natives class must meet the requirements determined by the 1898 Statute 158 and Civil Code. As a result of intermarriage of wealth that marriage is the unity of marriage asset.

The thesis used a normative juridical approach. Specifications of this research is descriptive. The author takes a case study of the Supreme Court Decision No. 188 PK / PDT / 1981 dated December 22, 1982 jo. Supreme Court Decision No. 1387 / K / SIP / 1977 dated January 18, 1979 jo. Surabaya High Court Decision No. 135/1977 Pdt. dated May 23, 1977 jo. Kediri District Court Decision No. 55/1976 Pdt. dated August 24, 1976. The data was collected through literature (secondary data). Methods of data analysis is qualitative analysis.

Sale and purchase in 1975 of rights on land owned by Natives class conducted by Chinese class of foreign nationality in mixed marriages with the natives (Indonesian citizen) who are not registered in the Civil Registry Office legal consequences do not occur unity of marriage asset, so that buying and selling is contrary to Law No. 5 of 1960 on the Basic Regulation of Agraria.

Keywords : mixed marriages, unity of marriage asset, the transfer of rights on lands, and buying and selling